

Pemetaan Tematik Batas Wilayah Administrasi RT & RW Sub Wilayah Cibeunying Pada Pelaksanaan Bandung *Smart City*

TEGUH ANGGARA¹, M.A. BASYID²

1. Institut Teknologi Nasional Bandung
 2. Institut Teknologi Nasional Bandung
- Email : anggarateguh909@gmail.com

ABSTRAK

Batas administrasi dapat memberikan kejelasan dan kepastian terhadap batas RT & RW, sehingga dalam lingkup perencanaan tata ruang kota kedetailan informasi hingga batas administrasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga memberikan kontribusi terhadap kehandalan data yang disampaikan dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan pengelolaan kota. dilaksanakan pekerjaan Pemetaan Batas Wilayah RW & RT Kota Bandung sebagai elemen pendukung perwujudan program Bandung Smart City. Untuk pengelolaan wilayah Kota Bandung. Pembuatan peta batas wilayah RW & RT bertujuan untuk mengumpulkan data spasial kewilayahan yang tersebar di 151 kelurahan yang ada di wilayah Kota Bandung. Penyebarluasan data dan informasi mengenai kewilayahan berbasis spasial dengan menekankan kebijakan One Map Policy dan kegiatan penyelenggaraan Simpul jaringan. Dalam peranan Kewilayahan untuk Simpul Jaringan, Unsur Kewilayahan diharapkan dalam pengumpulan data-data berbasis spasial yang berkaitan dengan kegiatannya dan penyebarluaskannya secara vertikal maupun horizontal. Berbasis peta digital melalui deliniasi batas secara kartometrik dengan database/basis data wilayah administrasi RT & RW subwilayah Cibeunying Kota Bandung sehingga dihasilkan peta dasar yang diperlukan untuk mendukung Bandung Smart City dan dipergunakan sebagai dasar acuan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah di Kota Bandung

Kata kunci: *Batas Wilayah Administrasi, Smart City, Kartometrik*

1. PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonom dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat, merupakan daerah yang memiliki kedudukan strategis berdasarkan sektor unggulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dengan wilayah pengembangan (WP) KK Cekungan yang potensi utamanya di sektor industri, pertanian, hortikultura, industri kreatif, perkebunan, untuk meningkatkan peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fokus pengembangan Wilayah Kota Bandung pada hakekatnya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, dan teknologi tinggi, dan pariwisata. Hal ini merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan proses pembangunan tersebut diatas dibutuhkan suatu informasi keruangan (*spasial*) yang berbasis data wilayah secara menyeluruh dengan

mengacu pada rencana pengembangan wilayah tersebut. Dengan menggunakan sistem informasi geografis, hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah.

Pentingnya informasi geospasial dalam pembangunan yaitu untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian pada hukum, anggaran pembangunan, dan informasi. Ketersediaan informasi geospasial hingga tingkat desa sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan nasional (Badan Informasi Geospasial, 2014).

Pemetaan batas administrasi sampai ke tingkat RT & RW merupakan salah satu jenis penataan desa/kelurahan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan, serta sebagai wujud dari pembangunan desa/kelurahan. Batas administrasi dapat memberikan kejelasan dan kepastian terhadap batas RT & RW, sehingga dalam lingkup perencanaan tata ruang kota kedetailan informasi hingga batas administrasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga memberikan kontribusi terhadap kehandalan data yang disampaikan dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan pengelolaan kota. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dilaksanakan pekerjaan Pemetaan Batas Wilayah RW-RT Kota Bandung sebagai elemen pendukung perwujudan program Bandung *Smart City*.

2. DASAR TEORI

Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat (Soekidjo, 1994). Pengertian ini dalam pemetaan yaitu sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, dan penyajian dalam bentuk peta (Juhadi dkk, 2001).

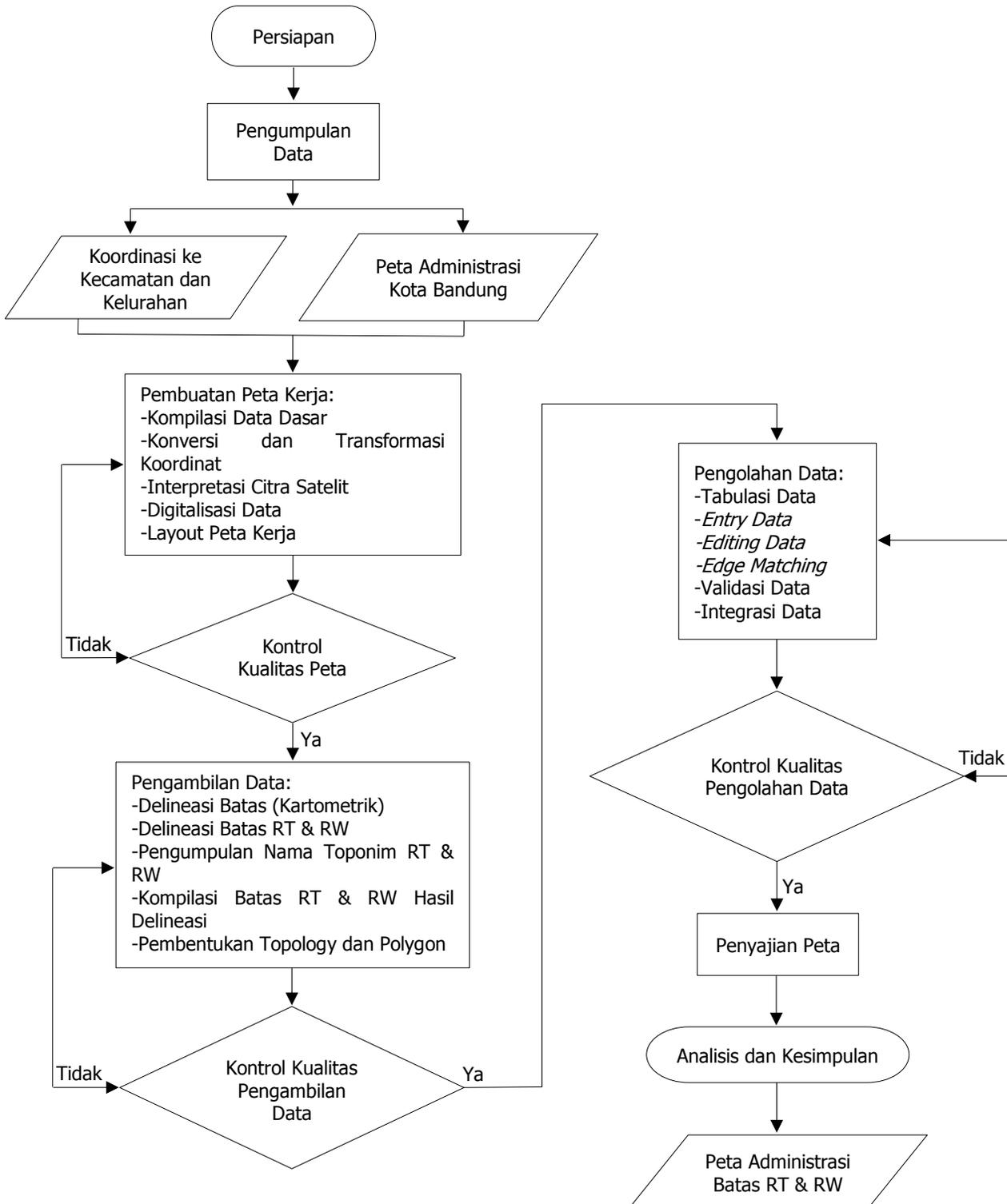
Definisi atau pengertian *Smart City* sangat beraneka ragam. Konsep tersebut sudah dikenal dengan populer, namun dalam prakteknya digunakan di berbagai negara dengan istilah yang berbeda-beda dan situasi yang berbeda pula. Ada penggunaan berbagai jenis konsep mengganti smart dengan istilah kata sifat lainnya. Menurut Wikipedia, *Smart City* adalah visi pembangunan perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) dan solusi Internet of Things (*IOT*) dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota. Berdasarkan Wikipedia, definisi *Smart City* itu begitu luas mencakup berbagai Sebuah kota pintar menyatukan teknologi, pemerintahan dan masyarakat untuk memungkinkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Ekonomi pintar (*smart economy*)
- b. Mobilitas Cerdas
- c. Lingkungan cerdas (*smart environment*)
- d. Orang pintar (*smart people*)
- e. Hidup Cerdas (*smart living*)
- f. Pemerintahan cerdas (*smart governance*) (Endang Puji Astutik dan Gunartin, 2017).

Secara administratif Kota Bandung terletak di wilayah administratif Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107°32'38.91" Bujur Timur dan

6°055'19.94" Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan.

3. METODOLOGI PENELITIAN



4. HASIL DAN ANALISIS

Pada kegiatan pembuatan batas administrasi RT/RW menghasilkan batas RT & RW di Sub Wilayah Cibeunying yang sudah disepakati oleh berbagai pihak terkait. Hasil validasi batas akan dibahas secara mendetil per kecamatan dan kelurahan.

Dari kegiatan survey dan pengolahan data lapangan, dihasilkan jumlah RW dan Jumlah RT yang terdapat dalam masing-masing kelurahan.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat di analisis database hasil pemetaan batas wilayah administrasi RT & RW dan penyajian peta Tematik batas wilayah administrasi sudah selesai dilakukan dan sesuai dengan data dilapangan yang sudah disepakati oleh berbagai pihak.

Tabulasi hasil pemetaan batas secara kartometrik dan peta administrasi batas wilayah RT & RW hasil deliniasi disajikan dibawah ini.

Tabel 4.1 Tabel Progress Pekerjaan dan Validasi Jumlah RT & RW

No	Kecamatan	Kelurahan	Tahun 2019		Hasil Validasi		Ket
			RW	RT	RW	RT	
SWK CIBEUNYING							
1	Bandung Wetan	Cihapit	8	46	8	46	Selesai Penarikan Garis 8 RW
		Citarum	8	36	8	36	Selesai Penarikan Garis 8 RW
		Tamansari	20	115	20	113	Selesai Penarikan Garis 20 RW
2	Cibeunying Kaler	Cigadung	15	91	15	89	Selesai Penarikan Garis 15 RW
		Cihargeulis	12	68	12	69	Selesai Penarikan Garis 12 RW
		Neglasari	8	39	8	39	Selesai Penarikan Garis 8 RW
		Sukaluyu	11	92	11	92	Selesai Penarikan Garis 11 RW
3	Cibeunying Kidul	Cicadas	15	93	15	75	Selesai Penarikan Garis 15 RW
		Cikutra	15	107	15	107	Selesai Penarikan Garis 15 RW
		Padasuka	16	103	16	93	Selesai Penarikan Garis 16 RW
		Pasirlayung	13	88	13	92	Selesai Penarikan Garis 13 RW
		Sukamaju	12	93	12	93	Selesai Penarikan Garis 12 RW
		Sukapada	16	98	16	98	Selesai Penarikan garis 16 RW
4	Cidadap	Ciumbuleuit	11	78	11	78	Selesai Penarikan garis 11 RW
		Hegarmanah	11	66	11	66	Selesai Penarikan garis 11 RW
		Ledeng	7	31	7	31	Selesai Penarikan garis 7 RW
5	Coblong	Cipaganti	7	52	7	53	Selesai Penarikan Garis 7 RW
		Dago	11	105	13	105	Selesai Penarikan garis 11 RW

No	Kecamatan	Kelurahan	Tahun 2019		Hasil Validasi		Ket
			RW	RT	RW	RT	
6	Sumur Bandung	lebakgede	9	64	15	69	Selesai Penarikan garis 9 RW
		lebaksiliwangi	6	23	6	25	Selesai Penarikan Garis 6 RW
		Sadang Serang	21	130	21	130	Selesai Penarikan Garis 21 RW
		Sekeloa	15	88	16	93	Selesai Penarikan Garis 16 RW
		Babakan Ciamis	8	43	8	43	Selesai Penarikan Garis 8 RW
		Braga	8	45	8	45	Selesai Penarikan Garis 8 RW
		Kebonpisang	12	85	12	85	Selesai Penarikan Garis 12 RW
		Merdeka	9	58	9	58	Selesai Penarikan Garis 9 RW
Jumlah		26	234	1.849			

(Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2020)

Tabel 4.2 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Bandung Wetan

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Tamansari	145.77
2	Citarum	244.03
3	Cihapit	107.98
Total		497.78

Tabel 4.3 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kaler

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Cigadung	242.16
2	Cihaurgeulis	64.24
3	Neglasari	75.44
4	Sukaluyu	68.76
Total		450.6

Tabel 4.4 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Cicadas	49.65
2	Cikutra	71.53
3	Padasuka	53.23
4	Pasirlayung	83.28
5	Sukamaju	25.15
6	Sukapada	59.77
Total		342.61

Tabel 4.5 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Cidadap

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Ciumbuleuit	980.27
2	Hegarmanah	152.36

3	Ledeng	155.20
Total		1,287.83

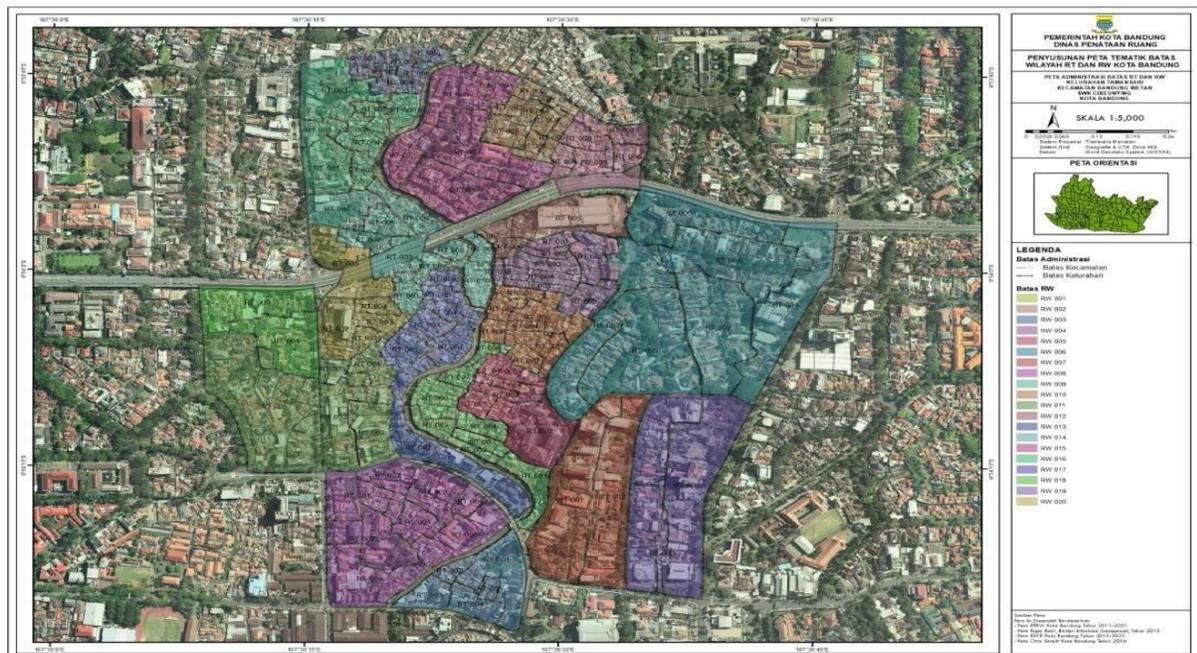
Tabel 4.6 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Coblong

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Cipaganti	132.72
2	Dago	254.70
3	Lebak Gede	94.47
4	Lebak Siliwangi	61.24
5	Sadang Serang	71.57
6	Sekeloa	2.08
Total		616.78

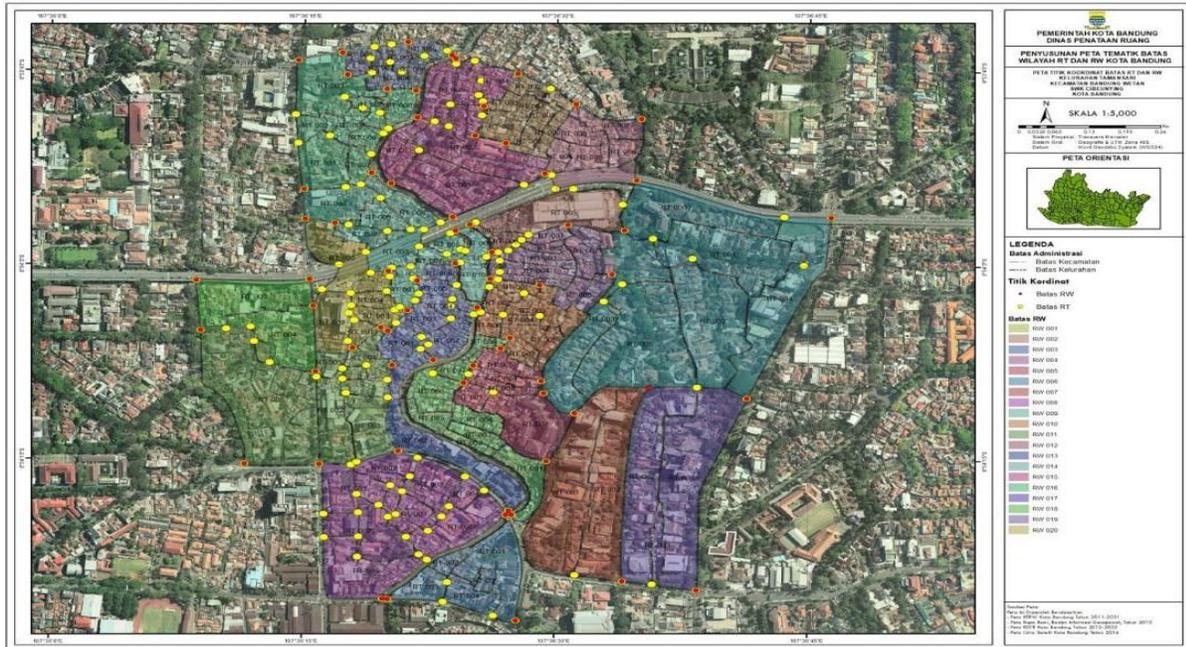
Tabel 4.7 Luas wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Babakan Ciamis	155.58
2	Braga	63.22
3	Kebon Pisang	49.81
4	Merdeka	82.90
Total		351.51

Luas Total wilayah pada Sub Wilayah Cibeunying Kota Bandung yaitu 3,547.11 Ha.



Gambar 4.1 Peta Batas RW dan RT di Kelurahan Tamansari



Gambar 4.2 Peta Titik Batas RW dan RT di Kelurahan Tamansari

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam proses kegiatan validasi batas administrasi di SWK Cibeunying sudah sesuai terhadap Permendagri No.45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu pada saat penarikan batas secara kartometrik sudah dilakukan pada kertas A0 (Peta Manuskrip) oleh pihak Kelurahan, RW & RT terkait ada penandatanganan berita acara dokumen batas. Koordinasi dan tingkat kooperasi dari masing-masing RW & RT serta kelurahan membantu tim validasi dalam penyusunan batas RW & RT di Sub Wilayah Cibeunying sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

Diharapkan pihak pemerintah kelurahan, RT & RW membawa dokumen batasnyamasing-masing untuk mempermudah dalam melakukan validasi:

- Instansi terkait perlu melakukan sosialisasi peta dasar dan data batas administrasi untuk menghindari terjadinya sengketa yang diakibatkan oleh perubahan lahan;
- Mengeluarkan peta batas administrasi desa beserta data koordinat batas untuk masing-masing wilayah sebagai dokumen batas;
- Perlu melakukan pemasangan patok batas sebagai penanda batas administrasi wilayah guna menghindari permasalahan klaim batas;
- Melakukan inventarisasi dokumen patok batas sebagai dasar penentuan batas untuk tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Syamwil, Indra., (2003) Peran Perencanaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Capacity Building For Decentralized Natural Resources Management, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2018). Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Pembuatan Peta Tematik Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ramdhani, Muhammad F. (2017). Geodatabase Peta Tematik Pemilikan Tanah Kota Banjarbaru. [Skripsi]. Bandung (ID): Institut Teknologi Nasional
- Chandra Eko Wahyudi Utomo¹, Mochamad Hariadi., (2016) Strategi Pembangunan *Smart City* dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol.4, No. 2
- Nur Faidati, Muhammad Khozin., (2018) Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta
- Renita Purwanti, Yanto Budisusanto., (2015) Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya
- Muhammad Arfan Latanza¹, Yurni Suasti, dan Endah Purwaningsih., (2019) Penentuan Batas Desa Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
- Pande Restu Adikresna P, Yanto Budisusanto., (2014) Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari)
- Arrafi Fahmi Fatkhawati, Noorhadi Rahardjo., (2016) Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra Spot Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur)
- Sulaksono, Dian., (2014). *Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Secara Kartometrik*. UGM. Yogyakarta.
- Wulansari E. (2014). *Evaluasi Informasi Geospasial Dalam Tahap Penetapan Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia*. UGM. Yogyakarta.
- Priskadini April Insani (2017). Mewujudkan Kota responsif Melalui Smart City.
Universitas Merdeka Malang.
- Sinaga, M. Irsan .2015. *Evaluasi Perbandingan Ketelitian Hasil Deliniasi Batas Desa Secara Kartometrik*. UGM. Yogyakarta.
- Eko Muliawan Satrio, Agus Rochani., (2019). Efektifitas Penerapan Konsep Smart City Ditinjau Dari Aspek Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang
- Maharani Imran, Iwan Armawan, (2019) Optimilisasi Smart City Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Di Indonesia

FTSP *Series 2* :
Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2021

Kusumowidagdo, Mulyadi, dkk. 2008. *Penginderaan Jauh Dan Interpretasi Citra*. Rapat Koordinasi Penegasan Batas. Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional. Semarang.